

Sosialisasi Pembuktian Kasus Hukum Kekeluargaan (Analisis Putusan Nomor 809/Pdt.P/2019/Pn. Dps)

Yuni Priskila Ginting¹, Angela², Dani Wardhana³, Kenzho Suwandi⁴, Lukas Malau⁵, Muhammad Revanza Almer Putra Harisman⁶, Nicholas Rianto Wijaya⁷, Steven Darylta⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Universitas Pelita Harapan

E-mail: yuni.ginting@uph.edu¹, 01051210007@student.uph.edu²,
01051210168@student.uph.edu³, 01051210005@student.uph.edu⁴,
01051210152@student.uph.edu⁵, 01051210137@student.uph.edu⁶,
01051210002@student.uph.edu⁷, 01051210143@student.uph.edu⁸

Article History:

Received: November, 2023

Revised: November, 2023

Accepted: November, 2023

Abstract: Jurnal ini membahas tanggung jawab yang timbul dalam akibat dari perkawinan menurut hukum keluarga serta tahapan dan bukti yang relevan yang dapat digunakan dalam proses pembuktian sebuah kasus hukum keluarga. Dalam kasus-kasus seperti perceraian, penentuan hak asuh anak, pembagian harta gono-gini, serta sengketa keluarga lainnya, fokus pada konsep tanggung jawab dan dampak pernikahan menjadi sorotan utama. Tahapan pembuktian, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan di ruang sidang, serta jenis bukti yang diterima dalam proses hukum keluarga dianalisis secara mendalam. Tinjauan ini juga mencakup aspek tanggung jawab individu dalam pernikahan, serta upaya pembuktian yang mencakup penggunaan bukti fisik, kesaksian, ahli, dan teknologi untuk memperkuat argumen dalam kasus-kasus hukum keluarga. Dengan fokus pada tanggung jawab, tahapan pembuktian, dan jenis bukti yang relevan, tujuan dari tinjauan ini adalah memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kompleksitas proses hukum keluarga kepada praktisi hukum, ahli, dan pihak terkait untuk membantu dalam pemecahan kasus dengan lebih efektif dan adil.

Keywords:

Keluarga, Perkawinan, Tahapan, Pembuktian

Pendahuluan

Hukum memiliki peran krusial dalam menjaga keteraturan suatu negara, namun keberadaan hukum juga terkait dengan masalah yang sering kali menghalangi fungsi utamanya. Di Indonesia, masih terdapat sejumlah permasalahan hukum yang belum

terselesaikan, tidak hanya terkait dengan penegakan hukum, melainkan juga terkait dengan substansi hukum itu sendiri. Meskipun tujuan dasar hukum adalah menciptakan ketertiban, kepastian hukum, dan keadilan, khususnya untuk melindungi hak semua individu tanpa pandang bulu, seringkali dalam konteks keluarga, hal ini juga berlaku. Pengasuhan yang seimbang tanpa membatasi kreativitas anak merupakan bagian penting dalam menciptakan harmoni dalam keluarga, sementara hukum keluarga mengatur hubungan antar anggota keluarga untuk memastikan kehidupan yang layak bagi setiap individu di dalamnya. Dalam realitasnya, konflik antar anggota keluarga tidak jarang terjadi, sehingga hukum keluarga menjadi penting dalam menyelesaikan konflik semacam itu. Penelitian ini membahas tentang Hukum Kekeluargaan dalam studi kasus putusan Nomor 809/Pdt.P/2019/PN. Dps.

Menurut Prof Soediman Kartohadiprodjo, hukum keluarga adalah semua kaidah-kaidah hukum yang menentukan syarat-syarat dan cara mengadakan hubungan abadi serta seluruh akibatnya. Sehingga hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum keluarga merujuk pada kumpulan aturan hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga, termasuk perkawinan, perceraian, hak asuh anak, perwalian, adopsi, serta masalah harta dan warisan keluarga. Ini juga mencakup aspek hukum yang berkaitan dengan hubungan antar individu dalam lingkup keluarga, seperti hak dan kewajiban suami istri, orang tua dan anak, serta peran hukum dalam menyelesaikan konflik yang timbul di lingkungan keluarga. Adapun definisi lain dari keluarga yaitu sebagai kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi. Definisi tersebut menunjukkan bahwa keluarga mensyaratkan adanya hubungan perkawinan, hubungan darah, maupun adopsi sebagai pengikat.

Dalam hukum keluarga di Indonesia terdapat asas ataupun prinsip-prinsip hukum yang diterapkan dalam hukum keluarga, antara lain¹:

- 1) Asas monogami, yaitu suami atau istri hanya boleh memiliki satu pasangan hidup.

¹ 1. Tim Humas, "Pengertian Hukum Keluarga, Sumber, Asas, Serta Ruang Lingkupnya," Universitas Islam An Nur Lampung, accessed November 9, 2023, <https://an-nur.ac.id/pengertian-hukum-keluarga-sumber-asas-serta-ruang-lingkupnya/>.

- 2) Asas konsensual, yaitu perkawinan atau perwalian sah apabila terdapat persetujuan atau konsensus antara calon suami-istri atau keluarga.
- 3) Asas proporsional, yaitu hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan di dalam pergaulan masyarakat.
- 4) Asas persatuan bulat, yaitu antara suami istri terjadi persatuan harta benda yang dimilikinya.
- 5) Asas kebulatan, yaitu suami istri menggabungkan hartanya.

Selain itu, terdapat juga beberapa asas hukum keluarga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditemukan dalam beda pasal terkait, yaitu:

- 1) Asas kebebasan, yaitu hak setiap individu untuk memilih pasangan hidupnya.
- 2) Asas perlindungan dan preventif, yaitu upaya untuk mencegah terjadinya perbuatan yang merugikan dalam hubungan keluarga.
- 3) Asas tanggung jawab dan keadilan, yaitu suami dan istri memiliki tanggung jawab yang sama dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan memperoleh hak yang sama dalam harta benda.
- 4) Asas ijbari, yaitu suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya.
- 5) Asas bilateral, yaitu suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memenuhi kebutuhan keluarga.
- 6) Asas keadilan berimbang, yaitu hak dan kewajiban suami dan istri seimbang.
- 7) Asas kepastian hukum, yaitu hukum keluarga harus jelas dan pasti.
- 8) Asas-asas hukum keluarga di atas dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah hukum keluarga dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Hasil

A. Hak dan Tanggung Jawab yang Timbul dari Adanya Perkawinan

Dengan pernikahan suami dan istri, muncul kewajiban timbal balik di mana baik suami maupun istri memiliki hak-hak dan tanggung jawab mereka sendiri. Hak-hak yang dimiliki oleh suami sejalan dengan tanggung jawab yang harus diemban, begitu

juga halnya dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh istri. Keduanya memiliki hak untuk menggunakan hak-hak mereka, tetapi juga memiliki kewajiban untuk tidak menyalahgunakan hak-hak tersebut.

Pasal 30 dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 menegaskan bahwa suami dan istri memiliki tanggung jawab yang mulia untuk menjaga keberlangsungan rumah tangga yang merupakan dasar dari struktur sosial masyarakat.

Mengenai hak dan kedudukan suami dan istri, Pasal 31 dalam Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa kedudukan istri sebanding dengan suami dalam kehidupan rumah tangga serta interaksi dalam masyarakat. Kedua belah pihak memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum. Suami diakui sebagai kepala keluarga sementara istri diakui sebagai ibu rumah tangga.

Adapun mengenai kewajiban-kewajiban suami dan istri, terdapat ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang mengamanatkan bahwa suami berkewajiban melindungi istrinya dan menyediakan kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sementara itu, kewajiban istri adalah mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu pihak mengabaikan kewajibannya, baik suami maupun istri berhak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.²

B. Kekuasaan Orang Tua Ditinjau dari Sudut Pandang dan Tanggung Jawab

Dengan adanya perkawinan, timbul hubungan hukum yang mencakup hak dan tanggung jawab antara suami dan istri serta kelahiran anak-anak dari pernikahan tersebut. Dari situ terbentuk relasi hukum antara orang tua dan anak-anak mereka yang melibatkan hak dan kewajiban.

Menurut KUHPerdara dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, umumnya disebutkan bahwa kewenangan orang tua terhadap anak merupakan tanggung jawab, dimana tanggung jawab ini meliputi memberikan pendidikan dan kehidupan yang layak bagi anak. Oleh karena itu, orang tua diharapkan untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik mungkin hingga anak-anak tersebut menikah atau mampu mandiri, bahkan jika hubungan pernikahan orang tua telah terputus.

² Laurensius Mamahit, *HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA*, Vol.I, Lex Privatum, Jan-Mrt/2013, Hal 18

Tanggung jawab orang tua tidak hanya terbatas pada individu anak-anak, tetapi juga terkait dengan kekayaan yang dimiliki oleh anak-anak mereka. Hal ini karena bisa saja anak yang masih di bawah umur atau yang masih dalam kandungan telah memiliki harta, seperti yang disebutkan dalam Pasal 48 UU No. 1 Tahun 1974, misalnya karena menerima warisan atau hibah.

Oleh sebab itu, orang tua bertanggung jawab untuk mengelola harta anak dengan batasan, yang mengharuskan orang tua untuk tidak mentransfer atau memberikan gadai pada harta milik anak, kecuali jika itu untuk kepentingan anak, seperti untuk biaya sekolah anak. Adapun fungsi adanya kekuasaan orang tua menurut Pasal 298 KUHPerdata antara lain adalah:

“Si bapak dan si Ibu keduanya berkewajiban memelihara dan mendidik sekalian anak mereka sebelum dewasa. Kehilangan hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau untuk menjadi wali tak membebaskan mereka dari kewajiban memberikan tunjangan-tunjangan dalam keseimbangan dengan pendapatan mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan itu. ”

Kemudian mengenai berlakunya kekuasaan orang tua didasarkan pada Pasal 299 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa:

“Sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak sampai ia menjadi dewasa atau sudah kawin, tetap bernaung di bawah kekuasaan mereka sekadar mereka tidak dibebaskan dari kekuasaan itu.”³

Dalam sudut pandang hukum kekeluargaan, kekuasaan orang tua dapat dielaborasi sebagai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh orang tua terhadap anak-anak mereka. Ini termasuk hak untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan anak, seperti pendidikan, kesehatan, agama, dan lain-lain. Namun, kekuasaan ini juga disertai dengan kewajiban untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan anak, baik secara fisik maupun emosional.

Kekuasaan orang tua dalam hukum kekeluargaan juga mencakup kewajiban untuk memberikan na ah, tempat tinggal yang aman, dan pendidikan yang sesuai. Selain itu, dalam situasi perceraian atau pemisahan, pengadilan mungkin akan memutuskan

³ Mesa Siti Maesaroh, “Apakah Kekuasaan Orang Tua TERHADAP Anaknya Dapat Berakhir? Berikut Penjelasannya!: Heylaw,” HeyLaw Indonesia, December 6, 2021, https://heyLaw.id/blog/berakhirnya-kekuasaan-orang-tua#google_vignette.

hak asuh anak, di mana kekuasaan orang tua dibagi antara kedua orang tua dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.

Sementara hukum mengatur kekuasaan orang tua, tujuan utamanya adalah melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh orang tua selalu mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak.

Kekuasaan orang tua dapat berakhir apabila Karena pembebasan dari kedua orang tua; Karena pencabutan/pemecatan kekuasaan dari kedua orang tua; Karena kematian anak; Karena anak menjadi dewasa; Karena pencabutan terhadap salah satu orang tua; Pembubaran perkawinan orang tua anak tersebut.⁴

C. Tahapan Pembuktian dalam Kasus Hukum Kekeluargaan

Dalam tahapan pembuktian kasus hukum keluarga memiliki beberapa tahapan pembuktian yang perlu dilakukan dalam tahap pembuktian. Berikut adalah tahapan-tahapan pembuktian dalam kasus hukum keluarga:

1) Penyelidikan ⁵

Tahapan penyelidikan dalam kasus keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum agar memastikan keputusan yang diambil oleh pihak pengadilan berdasarkan bukti yang kuat dan akurat. Dengan adanya penyelidikan membantu dalam pengumpulan bukti yang objektif dan terperinci mengenai situasi keluarga yang terlibat dalam sengketa hukum. Ini dapat mencakup laporan medis, saksi-saksi, catatan keuangan, dan dokumentasi lainnya yang relevan dengan kasus.

Dalam kasus perceraian atau penentuan hak asuh anak, penyelidikan dapat membantu memastikan keamanan dan kesejahteraan anak-anak. Ini termasuk memeriksa kondisi tempat tinggal, pendidikan, dan apakah ada tanda-tanda kekerasan atau penelantaran terhadap anak-anak. Penyelidikan dapat membantu mengidentifikasi kelayakan orang tua atau anggota keluarga lainnya yang terlibat dalam kasus hukum. Ini melibatkan pemeriksaan latar belakang, kesejahteraan

⁴ Dimas Pranowo, "Opini: Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Permohonan Pembebasan Orangtua Dari Kekuasaannya," Official Website Persatuan Jaksa Indonesia, November 20, 2011, <https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1209#:~:text=Kapan%20kekuasaan%20orang%20tua%20berakhir,perkawinan%20orang%20tua%20anak%20tersebut>

emosional, dan kemampuan finansial untuk merawat anak-anak atau anggota keluarga yang membutuhkan perhatian khusus.

Dalam kasus perceraian atau pemisahan, penyelidikan dapat membantu menilai kondisi rumah tangga, termasuk faktor-faktor seperti kebersihan, keamanan, dan stabilitas lingkungan tempat tinggal. Penyelidikan dapat membantu mengungkap kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan yang mungkin terjadi di lingkungan keluarga. Ini sangat penting untuk melindungi korban kekerasan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan keamanan mereka. Dalam kasus pembagian harta bersama atau hak aset keluarga, penyelidikan dapat membantu mengumpulkan bukti-bukti keuangan yang diperlukan untuk memastikan pembagian yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Mendukung Keputusan Pengadilan: Penyelidikan yang cermat dan akurat dapat memberikan dasar yang kuat bagi pengadilan untuk membuat keputusan yang adil dan berkeadilan dalam kasus keluarga.

Dengan bantuan penyelidikan yang tepat, pengadilan dapat membuat keputusan yang didasarkan pada fakta dan bukti yang akurat, yang pada akhirnya dapat melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam kasus keluarga dan memastikan keadilan dalam sistem hukum. Dalam Tata cara⁵ penyelidikan kasus perdata melibatkan serangkaian langkah yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan guna mendukung klaim atau pembelaan mereka di pengadilan. Berikut adalah tata cara penyelidikan kasus keluarga:

1. Konsultasi dengan Pengacara langkah pertama adalah berkonsultasi dengan pihak pengacara. Pengacara akan memberikan nasihat hukum, membimbing dalam proses penyelidikan, dan memberikan petunjuk tentang jenis bukti yang diperlukan.
2. Penelitian Awal
Pengacara dan timnya melakukan penelitian awal untuk memahami kasus secara mendalam. Mereka akan memeriksa dokumen-dokumen yang relevan,

⁵ <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/tahapan-penyelidikan/>

seperti kontrak, surat perjanjian, tagihan, dan catatan lainnya yang terkait dengan sengketa.

3. Wawancara dengan Klien

Pengacara akan melakukan wawancara mendalam dengan klien untuk memahami versi cerita mereka tentang kasus. Wawancara ini membantu pengacara memahami fakta-fakta yang relevan dan memilih pendekatan terbaik untuk kasus tersebut.

4. Pengumpulan Bukti

Pengacara dan timnya akan mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung klaim atau pembelaan klien. Ini bisa termasuk dokumen-dokumen, rekaman, surat elektronik, dan informasi lainnya yang dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan.

5. Wawancara dengan Saksi

Jika ada saksi-saksi yang memiliki informasi relevan, pengacara dapat melakukan wawancara dengan mereka. Catatan wawancara dengan saksi-saksi ini dapat menjadi bukti yang kuat di pengadilan.

6. Penyelidikan Lapangan

Dalam beberapa kasus, penyelidikan lapangan mungkin diperlukan. Ini termasuk survei lokasi, pengambilan foto, atau pengumpulan informasi lainnya yang relevan dengan kasus.

7. Evaluasi dan Analisis Bukti

Pengacara akan menilai kekuatan dan kelemahan bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Mereka akan mengidentifikasi bukti yang paling kuat dan merencanakan strategi penggunaannya di pengadilan.

8. Penyusunan Gugatan atau Pembelaan

Berdasarkan hasil penyelidikan dan analisis bukti, pengacara akan menyusun dokumen gugatan atau pembelaan. Dokumen ini akan merinci klaim atau argumen yang diajukan ke pengadilan.

9. Negosiasi atau Mediasi (Opsional)

Sebelum membawa kasus ke pengadilan, pihak-pihak yang terlibat dapat mencoba menyelesaikan sengketa melalui negosiasi atau mediasi. Pengacara dapat membantu dalam proses negosiasi ini untuk mencapai kesepakatan damai.

10. Persidangan

Jika negosiasi tidak berhasil, kasus akan diajukan ke pengadilan. Di pengadilan, pengacara akan mempresentasikan bukti dan argumen mereka untuk mempengaruhi keputusan hakim.

11. Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Jika pengadilan mengeluarkan putusan, pengacara akan membantu klien dalam melaksanakan putusan tersebut, memastikan bahwa hak-hak yang diakui oleh pengadilan dilaksanakan dengan benar.

Akan tetapi, tata cara penyelidikan dapat bervariasi tergantung pada kasusnya, dan sangat disarankan untuk bekerja sama dengan pengacara yang berpengalaman untuk memastikan bahwa semua langkah yang diperlukan diambil sesuai dengan hukum yang berlaku.

2) Pengumpulan Bukti

Pengumpulan bukti dalam kasus keluarga merupakan langkah penting dalam sistem hukum karena bukti-bukti ini membantu pengadilan untuk membuat keputusan yang adil, berdasarkan fakta dan informasi yang akurat. Pengumpulan bukti membantu mendokumentasikan fakta-fakta dan keterangan yang objektif mengenai situasi keluarga yang terlibat dalam sengketa hukum. Fakta dan bukti ini membantu menggambarkan gambaran yang sebenarnya mengenai keadaan keluarga dan membantu pengadilan memahami kasus dengan lebih baik. 7

Dalam kasus perceraian, penentuan hak asuh anak, pembagian harta bersama, atau kasus keluarga lainnya, bukti-bukti dapat digunakan untuk mendukung klaim atau pembelaan yang diajukan oleh pihak yang terlibat. Bukti tersebut bisa berupa dokumen hukum, surat, foto, saksi, atau informasi lain yang relevan dengan kasus. Dalam kasus penentuan hak asuh anak, bukti-bukti dapat membantu pengadilan menilai kelayakan orang tua yang bersangkutan. Ini bisa mencakup catatan keuangan, laporan medis, saksi-saksi, atau bukti lain yang membuktikan kemampuan orang tua untuk merawat dan mendidik anak-anak dengan baik.

Bukti-bukti yang diperoleh dengan cermat membantu pengadilan dalam membuat keputusan yang adil dan berdasarkan fakta. Pengadilan menggunakan

bukti-bukti ini sebagai dasar untuk memutuskan hak-hak dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam kasus keluarga. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan, pengumpulan bukti dapat membantu melindungi anak-anak dan anggota keluarga lainnya yang rentan. Bukti-bukti kekerasan atau pelecehan adalah kunci untuk mengambil langkah-langkah perlindungan yang sesuai.

Dan dari Bukti-bukti dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi rumah tangga, termasuk kebersihan, keamanan, dan stabilitas lingkungan tempat tinggal. Ini penting dalam kasus penentuan hak asuh anak atau keputusan terkait dengan lingkungan keluarga. Dengan memperoleh bukti yang akurat dan relevan, pengadilan dapat membuat keputusan yang berdasarkan fakta, melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam kasus keluarga, dan memastikan keadilan dalam proses hukum. Oleh karena itu, pengumpulan bukti sangat penting untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan benar dan adil.

Penyusunan bukti yang baik dapat memperkuat argumen dalam persidangan dan membantu pengadilan membuat keputusan yang tepat. Berikut adalah beberapa tahapan tata cara pengumpulan bukti yang baik:

1. Konsultasi dengan Pengacara: Langkah pertama adalah berkonsultasi dengan pengacara yang berpengalaman. Pengacara dapat memberikan panduan tentang jenis bukti yang diperlukan, serta membantu merencanakan strategi pengumpulan bukti.
2. Identifikasi Jenis Bukti yang Diperlukan: Bersama dengan pengacara, identifikasi jenis bukti yang relevan dengan kasus Anda. Ini bisa mencakup dokumen, saksi, rekaman, surat elektronik, foto, atau informasi lainnya yang mendukung klaim atau pembelaan Anda.
3. Pengumpulan Dokumen: Kumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dengan kasus Anda. Ini bisa melibatkan surat, faktur, kontrak, bukti pembayaran, catatan medis, atau dokumen-dokumen lain yang mendukung argumen Anda. Pastikan dokumen-dokumen ini sah dan dapat diakui di pengadilan.
4. Wawancara dengan Saksi: Jika ada saksi yang memiliki informasi relevan, lakukan wawancara dengan mereka. Catat pernyataan saksi dengan

seksama dan pastikan untuk mendokumentasikan informasi kontak mereka untuk penggunaan selanjutnya.

5. Pengambilan Foto dan Rekaman: Dalam kasus yang memerlukan bukti visual, seperti kasus kecelakaan atau kerusakan properti, ambil foto atau rekaman video yang jelas. Foto atau rekaman ini dapat menjadi bukti yang kuat di pengadilan.
6. Pengumpulan Bukti Elektronik: Jika bukti melibatkan pesan teks, email, atau dokumen elektronik lainnya, pastikan untuk mengumpulkannya dengan hati-hati. Buat cadangan dari bukti-bukti elektronik ini untuk memastikan keasliannya dan integritasnya.
7. Menyusun Daftar Bukti: Buat daftar yang rinci tentang bukti-bukti yang telah Anda kumpulkan. Cantumkan deskripsi bukti, tanggal di mana bukti tersebut diperoleh, dan informasi kontak saksi-saksi, jika ada.
8. Validasi dan Verifikasi Bukti: Validasi dan verifikasi semua bukti yang Anda kumpulkan. Pastikan bukti-bukti tersebut bersifat sah, relevan, dan dapat diandalkan. Hindari menggunakan bukti yang tidak sah atau hasil dari praktik yang melanggar hukum.
9. Pengajuan Bukti ke Pengadilan: Saat memasuki tahap persidangan, pengacara Anda akan mengajukan bukti-bukti ini ke pengadilan. Pastikan bahwa prosedur pengajuan bukti diikuti sesuai dengan aturan dan tata tertib pengadilan yang berlaku.
10. Penyimpanan Bukti: Simpan bukti-bukti dengan aman setelah proses pengajuan ke pengadilan selesai. Simpan salinan digital dan fisik dari bukti-bukti tersebut untuk referensi di masa mendatang jika diperlukan.

Penting untuk mengingat bahwa setiap kasus dapat memiliki persyaratan bukti yang berbeda-beda. Oleh karena itu, berdiskusi dengan pengacara yang ahli dalam bidang hukum yang sesuai dengan kasus Anda adalah langkah terbaik untuk memastikan bahwa bukti-bukti yang dikumpulkan cukup kuat dan sah untuk mendukung argumen Anda di pengadilan.

3) Wawancara Saksi

Tahapan wawancara saksi adalah proses penting dalam menyusun sebuah kasus hukum, termasuk dalam kasus keluarga. Wawancara saksi dilakukan untuk

mendapatkan informasi yang relevan dan akurat mengenai fakta-fakta yang terkait dengan kasus. Mendapatkan Informasi Langsung: Wawancara saksi memungkinkan pengacara untuk mendapatkan informasi langsung dari orang yang berada di tempat kejadian atau yang memiliki pengetahuan langsung tentang peristiwa yang terjadi. Ini membantu memperoleh gambaran yang lebih jelas dan lengkap tentang kasus.

Dengan mengajukan pertanyaan yang tepat dan terperinci, pengacara dapat memeriksa konsistensi keterangan saksi. Ini penting untuk menilai keandalan dan kebenaran kesaksian mereka. Jika ada perbedaan antara kesaksian saksi pada waktu yang berbeda, hal ini bisa menjadi dasar untuk pertanyaan lebih lanjut atau penilaian oleh pengadilan. Melalui wawancara, pengacara dapat mencoba memahami motivasi dan keyakinan saksi terhadap kasus tersebut. Ini dapat membantu mengidentifikasi apakah ada bias atau kepentingan tertentu yang mempengaruhi kesaksian mereka.

Wawancara saksi membantu pengacara mempersiapkan strategi persidangan. Dengan memahami kesaksian yang akan disampaikan oleh saksi, pengacara dapat merencanakan pertanyaan yang efektif dan merencanakan cara untuk menghadapi kesaksian dari pihak lawan. Kesaksian saksi dapat membantu pengacara mengidentifikasi bukti-bukti tambahan yang dapat mendukung argumen mereka. Saksi mungkin menyebutkan dokumen, surat, atau fakta-fakta lain yang bisa menjadi bukti yang kuat di pengadilan.

Dengan melakukan wawancara yang teliti dan menyeluruh, pengacara dapat membantu saksi merasa lebih percaya diri dan siap ketika memberikan kesaksian di persidangan. Persiapan yang baik dapat membantu saksi menjelaskan informasi dengan jelas dan mantap, sehingga kesaksian mereka lebih meyakinkan di mata hakim. Dalam proses wawancara, pengacara harus menjaga etika dan integritas dalam mengajukan pertanyaan kepada saksi. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas dan integritas kasus yang disampaikan di pengadilan.

Tata cara wawancara saksi adalah dengan adanya persiapan, Sebelum wawancara dimulai, Pelajari catatan kasus, bukti-bukti yang ada, dan pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan kepada saksi. Rencanakan pendekatan Anda agar wawancara berjalan lancar dan terstruktur. Memulai wawancara dengan

berbicara sopan. Bangun hubungan empati dengan saksi agar mereka merasa nyaman berbicara dengan Anda. Tunjukkan rasa penghargaan terhadap kesaksian mereka.

Mulailah dengan pertanyaan terbuka yang memungkinkan saksi menjelaskan ceritanya dengan bebas. Hindari pertanyaan tertutup yang hanya memerlukan jawaban "ya" atau "tidak". Pertanyaan terbuka memberi kesempatan kepada saksi untuk berbicara lebih banyak. Dengarkan dengan aktif ketika saksi berbicara. Berikan sinyal-sinyal non-verbal yang menunjukkan bahwa Anda memperhatikan dan memahami apa yang mereka katakan. Jangan menginterupsi saksi saat mereka berbicara.

Gunakan pertanyaan penggali untuk mendapatkan rincian lebih lanjut tentang cerita saksi. Amati bahasa tubuh saksi selama wawancara. Bahasa tubuh dapat memberikan petunjuk tentang kejujuran dan kepercayaan diri saksi. Ketika saksi ragu atau tidak yakin, hal ini bisa tercermin dalam bahasa tubuh mereka. Hindari pertanyaan yang bersifat sugestif atau mencoba mempengaruhi jawaban saksi. Pertanyaan seharusnya netral dan tidak mengarahkan saksi untuk memberikan jawaban tertentu.

Berbicaralah dengan jelas dan tegas. Pastikan bahwa saksi memahami pertanyaan Anda dengan baik. Jika saksi meminta klarifikasi, berikan penjelasan dengan ramah. Berterima Kasih dan Konfirmasi Kesaksian: Setelah wawancara selesai, berterima kasih kepada saksi atas waktu dan kerjasamanya. Konfirmasikan kesaksian yang telah diungkapkan oleh saksi dan pastikan Anda memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang mereka katakan. Selama wawancara, catat informasi penting yang diberikan oleh saksi. Catatan tersebut akan membantu Anda merancang strategi kasus dan merujuk kembali pada detail-detail kunci saat persidangan berlangsung. Jaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh saksi. Pastikan bahwa informasi tersebut tidak tersebar ke pihak lain yang tidak berkepentingan dalam kasus.

4) Analisis Forensik

Tahapan Analisis Forensik akan dilakukan untuk menangani kasus tertentu saja. Tahapan ini juga merupakan proses penting dalam menyusun sebuah kasus

hukum, termasuk dalam kasus keluarga. Analisis Forensik dilakukan untuk mendapatkan informasi yang relevan dan akurat mengenai fakta-fakta yang terkait dengan kejadian yang terjadi. Mendapatkan Informasi Langsung dari data hasil yang dilakukan dalam proses analisis forensik.

Analisis forensik dapat memberikan bukti ilmiah dan objektif yang mendukung keputusan pengadilan. Analisis forensik melibatkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi bukti. Dalam kasus hukum keluarga, bukti forensik bisa berupa tes DNA, analisis narkoba, tes alkohol, pemeriksaan psikologis, dan lain-lain. Bukti ilmiah ini dapat membantu menguatkan klaim atau pembelaan yang diajukan dalam kasus.

Dalam kasus penentuan hak asuh anak, analisis forensik seperti tes psikologis atau wawancara oleh ahli psikologi anak dapat memberikan informasi tentang kondisi psikologis anak, kebutuhan mereka, dan kesesuaian orang tua dengan kebutuhan anak. Analisis ini membantu pengadilan membuat keputusan yang terbaik untuk kesejahteraan anak. Analisis forensik, termasuk pemeriksaan medis dan analisis jejak digital, dapat membantu mengumpulkan bukti kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan. Analisis ini penting untuk melindungi korban kekerasan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan keamanan mereka.

Dalam kasus pembagian harta bersama, analisis forensik bisa berupa penilaian nilai properti, audit keuangan, atau analisis investasi. Analisis ini membantu mengidentifikasi nilai sebenarnya dari aset bersama dan memastikan pembagian harta yang adil dan sesuai dengan hukum. Dalam beberapa kasus, uji kesehatan mental oleh ahli psikiatri atau psikolog forensik dapat memberikan wawasan mendalam tentang kondisi mental individu yang terlibat dalam kasus keluarga. Informasi ini dapat mempengaruhi keputusan pengadilan terkait hak asuh anak atau keputusan lainnya yang melibatkan kondisi kesehatan mental.

Bukti-bukti forensik cenderung dianggap lebih tangkas dan dapat diandalkan di pengadilan karena didukung oleh metode ilmiah dan ahli profesional. Hal ini membedakannya dari bukti-bukti subjektif atau kesaksian yang mungkin kurang dapat diandalkan. Penggunaan analisis forensik mendukung pendekatan berbasis

bukti dalam proses peradilan. Pendekatan ini memastikan bahwa keputusan pengadilan didasarkan pada bukti-bukti ilmiah yang kuat, yang meningkatkan keadilan dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

5) Presentasi Bukti

Persentase bukti membantu pengadilan dan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus untuk menilai kekuatan dan kelemahan argumen yang disajikan. Persentase bukti membantu pihak-pihak yang terlibat dalam kasus untuk mengevaluasi kekuatan kasus mereka. Dengan melihat jumlah dan kualitas bukti yang dimiliki, pengacara dan klien dapat memahami sejauh mana kasus mereka dapat didukung di pengadilan.

Berdasarkan persentase bukti yang dimiliki, pengacara dapat merencanakan strategi hukum yang tepat. Jika bukti-bukti yang ada kuat, pengacara mungkin memilih untuk melanjutkan ke persidangan. Namun, jika bukti masih lemah, mereka mungkin mempertimbangkan negosiasi atau mediasi untuk mencapai kesepakatan yang lebih menguntungkan. Dengan mengetahui persentase bukti yang dimiliki, pengacara dapat menyusun argumentasi yang kuat dan meyakinkan. Mereka dapat fokus pada bukti-bukti yang paling relevan dan kuat untuk mendukung klaim atau pembelaan mereka di pengadilan.

Persentase bukti membantu pengacara menyusun pertanyaan yang efektif untuk saksi-saksi di persidangan. Mereka dapat menilai bukti mana yang perlu diperkuat melalui kesaksian saksi dan menyusun pertanyaan yang mendukung tujuan mereka. Dengan memahami persentase bukti, pihak-pihak yang terlibat dapat menilai risiko dan kesempatan yang mereka hadapi di pengadilan. Mereka dapat memahami seberapa besar kemungkinan sukses kasus mereka berdasarkan bukti yang dimiliki.

Pengacara dapat menggunakan persentase bukti untuk membimbing klien dengan realistis mengenai peluang kesuksesan kasus mereka. Ini membantu klien memahami ekspektasi yang realistis dan membuat keputusan yang informasional. Persentase bukti membantu pengadilan untuk memahami sejauh mana argumen yang disajikan didukung oleh bukti konkret. Ini membantu hakim membuat

keputusan yang berbasis pada fakta dan bukti yang ada, meningkatkan integritas sistem peradilan.

Dalam kasus hukum kekeluargaan, berbagai jenis bukti dapat digunakan untuk mendukung klaim atau tuntutan yang diajukan. Beberapa bukti yang umumnya digunakan dalam kasus hukum kekeluargaan meliputi

- 1) Dokumen Resmi, dokumen-dokumen resmi seperti akta perkawinan, akta kelahiran anak, putusan perceraian, perjanjian pranikah, serta akta kepemilikan properti bersama adalah bukti yang penting dalam kasus hukum kekeluargaan.
- 2) Rekaman Komunikasi, rekaman percakapan, pesan teks, atau email dapat digunakan untuk menunjukkan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam kasus hukum kekeluargaan.
- 3) Bukti Keuangan, rekaman keuangan seperti laporan pajak, rekening bank, dan laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai dukungan finansial, pembagian harta bersama, dan kewajiban keuangan lainnya.
- 4) Laporan Psikolog atau Konselor, dalam kasus perwalian anak atau masalah perasaan anak, laporan dari ahli psikologi atau konselor keluarga dapat digunakan sebagai bukti tentang kesejahteraan anak dan rekomendasi perawatan.
- 5) Saksi Mata, kesaksian dari saksi mata yang memiliki pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kasus dapat digunakan sebagai bukti penting.
- 6) Dokumen Medis, rekaman medis yang mencakup informasi tentang kondisi kesehatan anggota keluarga atau dokumen yang mendukung tuntutan terkait cedera fisik atau penyakit dapat digunakan.
- 7) Bukti Kekerasan dalam Rumah Tangga, laporan polisi, perintah perlindungan, rekaman medis, atau kesaksian saksi dapat digunakan sebagai bukti dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

- 8) Bukti Kepemilikan Aset Bersama, dalam kasus pembagian harta bersama, dokumen yang menunjukkan kepemilikan aset bersama seperti sertifikat rumah atau akun bank bersama adalah bukti yang relevan.⁶

D. Pembuktian Pada Putusan Nomor 809/Pdt/P/2019/PN. Dps

1) Latar Belakang Kasus

Putusan Nomor 809/Pdt/P/2019/PN. Dps membahas mengenai permohonan pengangkatan (adopsi) anak yang dilakukan oleh I Wayan Suandi (Pemohon I) dan Komang Asmariansi (Pemohon II) yang diwakili oleh I Wayan Mudita, S.H., M. Kn., Ayu Putu Eka Susanti Dewi, S.H., Para Advokat pada kantor Hukum Antariksa Law Firm. Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Mei 1990 dan telah tercatat pula dalam Akta Perkawinan Nomor: 708/KT 1993 tertanggal 25 September 1993 dan telah mengangkat seorang anak bernama I Putu Arya Krisna Adnyana Putra yang lahir pada tanggal 20 Mei 2016 dimana anak tersebut lahir diluar perkawinan antara Eka Andika Putra dengan Mishella Trisna Sari dan telah diadopsi sejak anak tersebut baru lahir yang saat itu dirawat di Bidan Ni Wayan Sinaryati, S.S.t, M.M.Kes. Para Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari kedua orang tua kandung anak dan persetujuan telah dibuat dan ditandatangani. Menambahkan, bahwa pengangkatan (adopsi) anak atas nama I Putu Arya Krisna Adnyana Putra telah disetujui oleh kedua anak kandung Para Pemohon atas nama Eka Andika Putra dan Kadek Ratih Indriyani Putri yang telah dituangkan dalam surat ketidakberatan. Keputusan pengangkatan (adopsi) anak tersebut juga telah mendapatkan persetujuan dari keluarga besar para pemohon dan tidak ada keberatan bahkan menerima anak tersebut dalam lingkungan keluarga besar. Selain itu, mengacu pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, calon orang tua angkat juga menganut agama yang sama dengan anak angkat bahkan telah melakukan upacara meras dan upacara tiga bulanan serta telah mengajukan permohonan kepada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali di Denpasar yang selanjutnya ditujukan kepada Kantor Dinas Sosial Provinsi Bali dan telah mendapatkan

⁶ Ramlan Prilla, Mengenal Jenis Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata, 30 Juni 2022. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/15189/Mengenal-Jenis-Alat-Bukti-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html>

Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia Nomor 463.1/471/IV-B/DISPMPT. Untuk menyelesaikan seluruh kewajiban dalam proses adopsi, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Denpasar atau Majelis Hakim/Hakim Tunggal yang menyatakan I Putu Arya Krisna Adnyana Putra adalah sah secara hukum sebagai anak angkat (adopsi) dan menyatakan seluruh alat bukti adalah sah secara hukum.

2) Analisis Putusan Nomor 809/Pdt.P/2019/PN. Dps

Pengangkatan anak bertujuan untuk memberikan kesejahteraan anak yang merupakan suatu kewajiban asasi setiap anggota masyarakat yang harus disadarkan pada setiap anggota masyarakat. Di Indonesia, praktik pengangkatan anak telah menjadi budaya masyarakat di berbagai daerah yang telah menjadi bagian dari hukum kekeluargaan dari berbagai masyarakat suku yang ada.

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Putusan Nomor 809/Pdt.P/2019/PN. Dps, pihak wali telah memenuhi dua unsur diatas, dimana orang tua angkat telah melakukan prosesi upacara adat yang dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat. Selain itu juga memenuhi ayat (3) pasal yang sama bahwa orang tua angkat menganut agama yang sama dengan calon anak angkat.

Dalam Putusan Nomor 809/Pdt.P/2019/PN. Dps, telah diberikan 23 alat bukti yakni bukti P-1 hingga P-23 yang telah diberikan materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya yang cocok/sesuai diantaranya adalah bukti Surat Permohonan Adopsi sebagai bukti P-1 dan fotocopy Surat Pernyataan Pengangkatan Kesepakatan Pengangkatan Anak sebagai bukti P-2, kecuali bukti P-4, P-5, P-12, P-15, P-20, dan P-21.

Selain itu, disamping bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

- a. **I Wayan Debyo**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa benar Pemohon mengajukan pengadilan untuk kepentingan masa depan anak tersebut dan benar bahwa Para Pemohon telah mengangkat seorang anak yang bernama I Putu Arya Krisna Adnyana Putra.

- b. **I Madre Suetra**, yang menyatakan hal yang sama dengan I Wayan Debyo serta menyertakan kebenaran bahwa pengangkatan anak tersebut telah mendapatkan persetujuan dari keluarga besar Para Pemohon yang telah mendapatkan persetujuan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, calon orang tua angkat juga telah memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan dan syarat yang dibutuhkan oleh calon anak angkat.

Kesimpulan

Hukum keluarga adalah bidang hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga, mencakup berbagai aspek seperti perkawinan, perceraian, hak asuh anak, perwalian, adopsi, serta masalah harta dan warisan keluarga. Ini juga mencakup hak dan kewajiban suami istri, orang tua dan anak, serta peran hukum dalam menyelesaikan konflik di lingkungan keluarga. Definisi keluarga sebagai kelompok primer menunjukkan bahwa pengikatnya dapat berupa hubungan perkawinan, hubungan darah, atau adopsi. Hukum keluarga memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan dan kesejahteraan keluarga, serta melindungi hak-hak individu di dalamnya. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang hukum keluarga sangat penting dalam konteks hukum dan masyarakat yang berfokus pada keluarga. kekuasaan orang tua adalah kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki oleh orang tua terhadap anak-anak mereka. Ini mencakup hak dan kewajiban untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan anak, seperti pendidikan, kesehatan, agama, dan sebagainya. Namun, kekuasaan ini selalu diimbangi dengan kewajiban untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan anak, baik secara fisik maupun emosional.

Kewenangan orang tua juga mencakup tanggung jawab untuk memberikan na ah, tempat tinggal yang aman, dan pendidikan yang sesuai bagi anak. Dalam situasi perceraian atau pemisahan, pengadilan dapat memutuskan hak asuh anak, yang membagi kekuasaan orang tua dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Kekuasaan orang tua dapat berakhir dalam berbagai situasi, seperti pembebasan dari kedua orang tua, pencabutan atau pemecatan kekuasaan dari kedua orang tua, kematian

anak, anak menjadi dewasa, pencabutan terhadap salah satu orang tua, atau pembubaran perkawinan orang tua anak tersebut.

Tujuan utama dari hukum kekeluargaan adalah melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh orang tua selalu mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak. Dengan demikian, hukum kekeluargaan berfokus pada aspek-aspek kesejahteraan anak dan memastikan bahwa orang tua bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan, perawatan, dan pendidikan yang sesuai untuk anak-anak mereka sepanjang masa kekuasaan orang tua berlangsung.

Daftar Referensi

HeyLaw Indonesia | Your Trusted Legal Edutech Platform. (2021, December 6). HeyLaw Indonesia | Your Trusted Legal Edutech Platform. Retrieved November 9, 2023, from https://heylaw.id/blog/berakhirnya-kekuasaan-orang-tua#google_vignette

Mamahit, L.(2013, Jan-Mrt). HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA. *Lex Privatum*, 1, 18.

Mengenal Jenis Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata. (n.d.). Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Retrieved November 9, 2023, from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-lahat/baca-artikel/15189/Mengenal-Jenis-Alat-Bukti-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html>

Official Website Persatuan Jaksa Indonesia. (2020, November 20). Official Website Persatuan Jaksa Indonesia. Retrieved November 9, 2023, from <https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1209>

Pengertian Hukum Keluarga, Sumber, Asas, serta Ruang Lingkupnya – Universitas Islam An Nur Lampung. (2023, January 4). Universitas Islam An Nur Lampung. Retrieved November 9, 2023, from <https://an-nur.ac.id/pengertian-hukum-keluarga-sumber-asas-serta-ruang-lingkupnya/>